



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Januari 2020/Periodik - 2019)

**BIDANG** : YUDIKATIF  
**LEMBAGA** : MAHKAMAH AGUNG  
**UNIT KERJA** : PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG  
**SUB UNIT KERJA** : PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : NOVTRI NELLI  
2. Jabatan : PANITERA PENGGANTI  
3. NHK : 426935

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 660.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 91 m<sup>2</sup>/36 m<sup>2</sup> di KOTA PADANG ,  
HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m<sup>2</sup>/63 m<sup>2</sup> di KOTA  
BUKITTINGGI , HASIL SENDIRI Rp. 520.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 96.000.000

1. MOBIL, NISSAN GRAND LIVINA MINIBUS Tahun 2011, HASIL  
SENDIRI Rp. 90.000.000
2. MOTOR, HONDA SUPRA X SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL  
SENDIRI Rp. 6.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. ---

**D. SURAT BERTHARGA** Rp. ---

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 78.811

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---

**Sub Total** Rp. 756.078.811

**III. HUTANG** Rp. 462.036.669

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 294.042.142

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **10 Februari 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.